



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

LKjIP

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas ridhoNYA segala tugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga di tahun 2023 secara umum berjalan baik. Sebagai salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dengan ini kami susun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LKjIP OPD) Tahun 2023. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik/Instansi kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dapat berjalan dengan baik termasuk dalam penyusunan laporan ini dan Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP tahun 2023 ini masih banyak kekurangan.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan selanjutnya membantu meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Purbalingga



DAFTAR ISI

	halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	8
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2 Analisis Capaian Kinerja	19
3.3 Realisasi Anggaran	53
3.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya	57
BAB IV PENUTUP	
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas	63
4.2 Permasalahan Yang Dihadapi	64
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	65
4.4 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, adalah setiap akhir tahun anggaran setiap OPD wajib menyusun Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, yang sudah berjalan sejak tahun 1998. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi yaitu terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Guna mencapai terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih baik dan benar, efektif, efisien, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban dalam pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan/ kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran guna terwujudnya akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat/ amanat;
2. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;

1.3 Gambaran Umum Organisasi

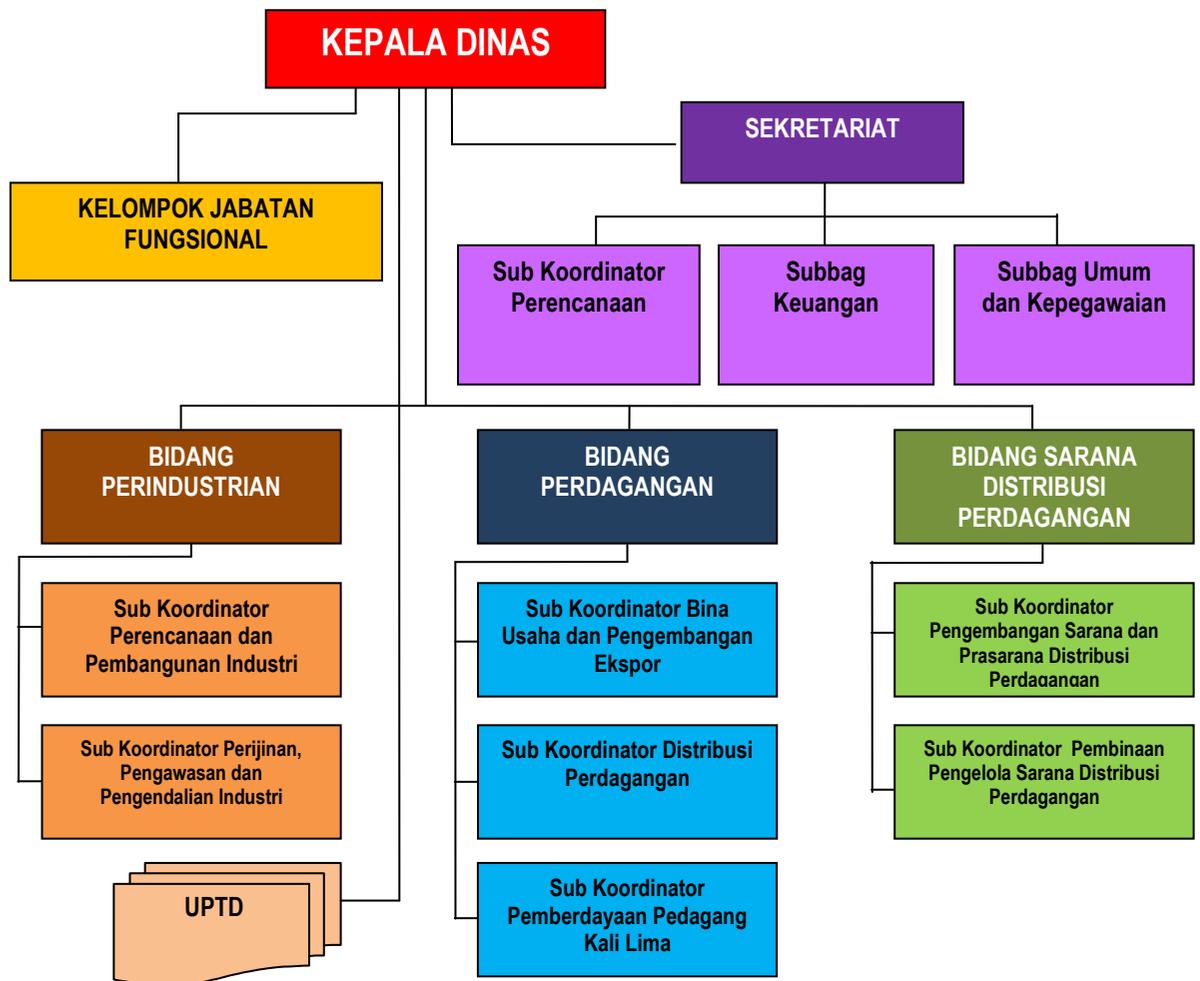
a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jalan Mayor Jendral Sungkono No. 24 Kabupaten Purbalingga, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 65 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas : 1 orang
2. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sekretaris Dinas : 1 orang
 2. Subbagian Keuangan : 1 orang
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian : 1 orang
 4. Sub Koordinator Perencanaan : 1 orang
3. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Perindustrian : 1 orang
 2. Sub Koordinator Perencanaan dan Pembangunan : 1 orang

- Industri
3. Sub Koordinator Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Industri : 1 orang
 4. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Perdagangan : 1 orang
 2. Sub Koordinator Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor : 1 orang
 3. Sub Koordinator Distribusi Perdagangan : 1 orang
 4. Sub Koordinator Pemberdayaan Pedagang Kali Lima : 1 orang
 5. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan : 1 orang
 2. Sub Koordinator Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan : 1 orang
 3. Sub Koordinator Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan : 1 orang
 6. Kelompok Jabatan Fungsional : 6 orang
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) : 5 UPTD



b. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 seluruhnya sebanyak 200 orang, terdiri dari :

1. PNS	=	64 Orang
2. PTT	=	136 Orang
Jumlah	=	200 Orang

**JUMLAH PTT
DILIHAT DARI URUTAN PENDIDIKANNYA**

NO	URAIAN	PENDIDIKAN					JML
		SD	SMP	SMA/K	D3	S1	
1	PTT	9	15	96	4	12	136

**JUMLAH PNS
DILIHAT DARI URUTAN PENDIDIKANNYA**

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN										JML
		SD	SMP	SMA/K	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Laki-Laki	5	4	19			3		15	5		51
2	Perempuan			3					9	1		13
Jumlah		5	4	22			3		24	6		64

**JUMLAH PNS
DILIHAT DARI URUTAN KEPANGKATANNYA**

NO	JENIS KELAMIN	GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV					JML
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1	Laki-Laki				4	4	5	8	5	8		7	4	2					47
2	Perempuan						2	2	5		3	4	1						17
Jumlah					4	4	7	10	10	8	3	11	5	2					64

Selengkapnya terlampir dalam DUK tahun 2023

c. Kondisi Sarana dan Prasarana

Untuk asset yang dikelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga saat ini menempati 2 (dua) buah gedung yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono Purbalingga, dimana satu buah gedung yang ditempati Bidang Perdagangan status tanahnya adalah milik Pemerintah Daerah Purbalingga dan satu gedung yang

ditempati Sekretariat dan Bidang Industri status tanahnya adalah masih milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk sarana operasional kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga mempunyai kendaraan roda empat sebanyak 10 buah kendaraan, terdiri dari :

- 4 buah kondisi baik
- 4 buah kondisi tidak layak
- 1 buah kondisi sangat tidak layak dan rusak

Sedangkan kendaraan roda dua sebanyak 31 buah, dan roda tiga sebanyak 1 buah.

1.4 Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Di Bidang Perindustrian, Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kendati demikian, kondisi IKM tetap rawan karena keberpihakan bank yang rendah, pasar bebas yang mulai dibuka, serta terbatasnya kebijakan yang mendukung sektor usaha kecil. Untuk itu pengembangan IKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Program dan kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya IKM, disamping itu mampu memecahkan permasalahan utama yang selama ini sering dihadapi IKM antara lain :

1. Penggunaan teknologi yang rendah
2. Kemampuan pemasaran terutama e-commerce dan pasar global yang terbatas;
3. Belum terjalin dengan baik kemitraan saling menguntungkan antar pelaku usaha (IKM, Usaha Besar dan BUMN);
4. Kelembagaan yang belum tertata dengan baik;

Sedangkan di Bidang Perdagangan permasalahan utama antara lain:

1. Kurang optimalnya ketepatan sasaran distribusi barang bersubsidi (pupuk dan LPG 3kg);
2. Masih terdapat pasar rakyat yang belum optimal kualitas sarana prasarana dan manajemen pengelolaannya;
3. Masih rendahnya kesadaran konsumen untuk menjadi konsumen cerdas;
4. Belum optimalnya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Gambaran Umum Organisasi
- 1.5 Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Realisasi Anggaran
- 3.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas
- 4.2 Permasalahan Yang Dihadapi
- 4.3 Strategi Pemecahan Masalah
- 4.4 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026

1. Visi

Visi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 adalah :

“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA“.

2. Misi

Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan implementasi dari misi kabupaten yang ke – 5 yaitu :

- Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja ”.

Dengan memperhatikan visi dan misi kabupaten tersebut, tersusunlah visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

"Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang mandiri berdaya saing, berwawasan lingkungan dan pengembangan potensi daerah".

Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Industri dan perdagangan yang mandiri dan berdaya saing

Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang mampu memenuhi kebutuhan lokal, regional, nasional dan internasional serta memenuhi standar mutu baik nasional maupun internasional.

2. Berwawasan lingkungan
Industri dan Perdagangan yang dikembangkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
3. Pengembangan potensi daerah
Pengembangan Industri dan Perdagangan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Melihat dari visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan implementasi dari misi Kabupaten Purbalingga yang ke – 5 kemudian dijabarkan menjadi misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu :

1. Meningkatkan peran sektor industri dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan fasilitasi pengembangan industri dan perdagangan berbasis potensi dan sumber daya lokal;
3. Mewujudkan sistem informasi di bidang Industri dan Perdagangan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing;
4. Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan dan sarana prasarana di bidang perindustrian dan perdagangan;
5. Meningkatkan sistem pengawasan perindustrian dan perdagangan serta perlindungan konsumen;

Adapun Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahunan dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026 sebagai berikut :

Tabel
Indikator Kinerja Dan Target Kinerja Tahunan Renstra

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
(1)		(2)					
Meningkatnya kinerja sektor perindustrian		Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,5	5	5	5,5	6
	Peningkatan Daya saing sektor perindustrian	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) atas dasar harga berlaku	7.520.557	7.896.585	8.291.414	8.747.442	9.272.289
Meningkatnya kinerja sektor perdagangan		Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan	4	4,5	4,5	5	5,5
	Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG	Nilai SAKIP DINPERINDAG	67,97	68,27	68,57	68,87	69,17
	Peningkatan daya saing sektor perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	3.335.863	3.485.976	3.642.845	3.824.988	4.035.362

B. Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi Misi dan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 sampai 5 tahun kedepan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan, maka perlu adanya perumusan kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur, serta sarana dan prasarana kerja;
2. Meningkatkan fasilitasi peningkatkan sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi di bidang industri dan perdagangan;

3. Penumbuhan wirausaha baru di bidang industri dan perdagangan;
4. Fasilitasi standarisasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk industri;
5. Fasilitasi peningkatan daya saing dan produk industri;
6. Fasilitasi pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
7. Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat, barang penting, barang strategis, barang bersubsidi serta barang perdagangan lainnya yang peredarannya perlu diawasi;
8. Pembinaan usaha dan kelembagaan perdagangan;
9. Penyediaan data dan informasi di bidang industri dan perdagangan;
10. Mengembangkan kemitraan di bidang industri dan perdagangan.

Indikator kinerja tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya kinerja sektor perindustrian dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan;
2. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan;

Dengan meningkatnya kinerja sektor perindustrian dan perdagangan menunjukkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Purbalingga menuju kearah yang lebih baik.

C. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan renstra tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya saing sektor perindustrian dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) atas dasar harga berlaku;

2. Peningkatan daya saing sektor perdagangan dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB);
3. Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai SAKIP DINPERINDAG

Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka program yang dikembangkan dalam rangka pelaksanaan bidang perindustrian dan perdagangan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
5. Program Pengembangan Ekspor
6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
7. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian dan Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Purbalingga untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	3,76%
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB)	Rupiah (Juta)	8.018.180
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	4,50%
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Rupiah (Juta)	3.620.500
		Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG	Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	72,41
		Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Prosentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	40%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 telah melaksanakan 7 (tujuh) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan yang didukung oleh Anggaran Tahun 2023 sebesar

Rp.12.902.766.000 dengan Rincian anggaran untuk setiap Program adalah sebagai berikut :

Tabel
Pagu Anggaran Per Program Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.715.061.000
2.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	12.488.000
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.564.729.000
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	174.988.000
5.	Program Pengembangan Ekspor	49.949.000
6.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	284.412.000
7.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.101.139.000
	Jumlah Total	12.902.766.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$92\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dengan Bupati Purbalingga. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100 \%$$

Sesuai dengan dokumen perencanaan kerja lima tahunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 s/d 2026 dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 s/d 2026 ada dua tujuan dan tiga sasaran strategis yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya selama lima tahun kedepan. Adapun dua tujuan tersebut yaitu Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian dan Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan dengan indikator capaiannya meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan. Dengan dua tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat mencapai tiga sasaran yang menjadi tujuan utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga yaitu Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian, Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG dengan indikator keberhasilan meningkatnya Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB), Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB) dan Nilai SAKIP DINPERINDAG.

Dengan berakhirnya keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga tahun 2023, sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023, terdapat dua indikator tujuan dan empat sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga ditahun 2023 sebagaimana pada tabel perjanjian kinerja tahun 2023 sebagai berikut.

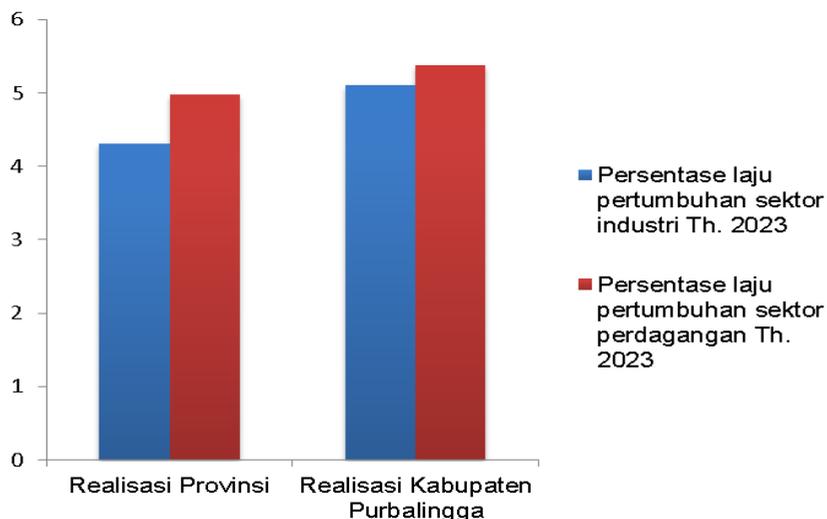
No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	RPJMD 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(08)	(09)
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	3,76%	5,10%	135,64	6
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB)	Rupiah (Juta)	8.018.180	8.832.360	110,15	9.272.289
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	4,50%	5,37%	119,33	5,5
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Rupiah (Juta)	3.620.500	3.934.080	108,66	4.035.362
		Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG	Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	72,41	73,01	100,83	69,17
		Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Prosentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	40%	72,12%	180,30	100
Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja							125,82	
Capaian Indikator Kinerja : Sangat Tinggi								

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Dari tabel diatas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga tahun 2023 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar **125,82% atau kategori sangat tinggi**.

Sejalan dengan prgram kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga juga mendukung tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yaitu Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan dengan indikator capaiannya adalah persentase laju pertumbuhan sektor industri dan persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Realisasi Provinsi Jawa Tengah Th. 2023	Realisasi Kabupaten Purbalingga Th. 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	Persentase laju pertumbuhan sektor industri	4,31	5,10
2.	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan	4,98	5,37



Tidak hanya mendukung Pemerintah Provinsi saja, Program Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga juga mendukung program-program pemerintah pusat, antara lain salah satu program yang menjadi sasaran strategis Kementerian Perdagangan yaitu Meningkatkan Pasar Produk Dalam Negeri yaitu melalui program Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik berupa kegiatan pembangunan/rehabilitasi pasar rakyat. Di tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga mendapat bantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui alokasi dana Tugas Pembantuan Tahun 2023 untuk Pembangunan Pasar Rakyat Badog Bancar Tahap II dengan nilai bantuan sebesar 3 milyar rupiah.

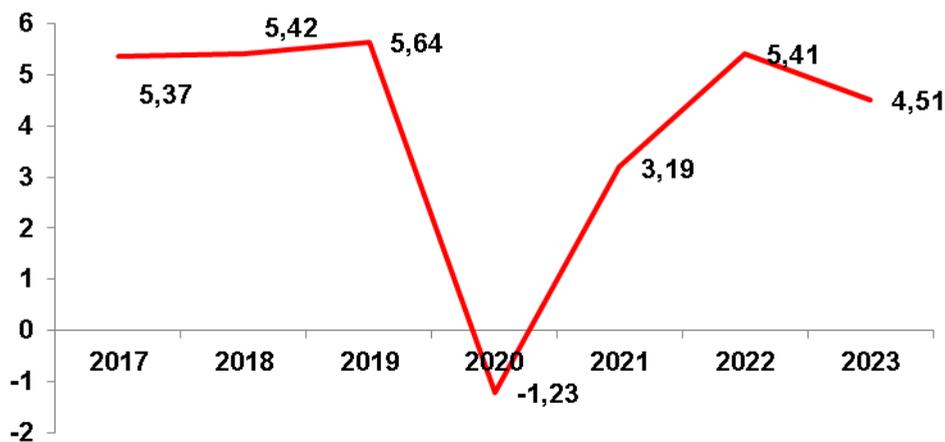
Program Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga yang sejalan dan mendukung tujuan/sasaran Kementerian Perindustrian Republik Indonesia adalah sasaran terwujudnya sistem informasi industri yang berkualitas yaitu sejalan dengan Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota salah satunya program SIINas. Sasaran strategis meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan non-migas pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia juga sejalan dengan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dengan kegiatan rutusnya adalah peningkatan daya saing IKM melalui pelatihan SDM dan bantuan sarana prasarana IKM.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga

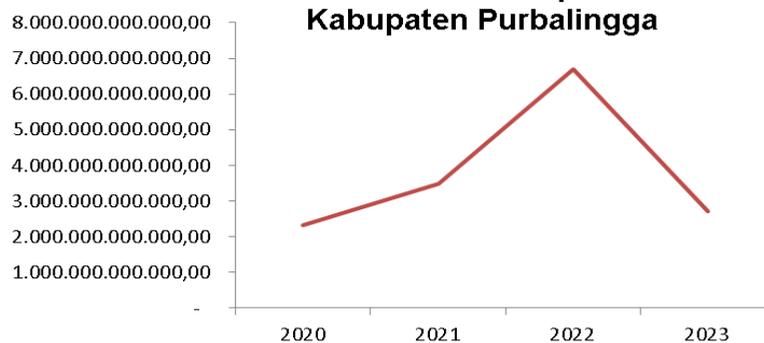
Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebesar 4,51% atau mengalami penurunan atau melambat sebesar 0,9% dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu sebesar 5,41%. Jika dibanding Tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 masih cukup tinggi dibandingkan Tahun 2021.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga



Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 diakibatkan berbagai faktor antara lain salah satunya adalah perubahan dalam permintaan konsumen hal ini dapat dilihatnya menurunnya nilai ekspor di tahun 2023.

Realisasi Ekspor Kabupaten Purbalingga



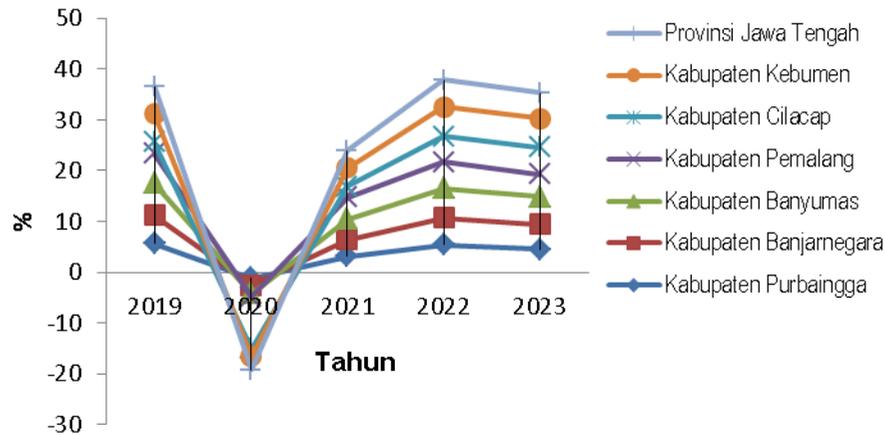
Uraian	2020	2021	2022	2023
Realisasi Ekspor Kabupaten Purbalingga	2.319.238.676.811,46	3.495.934.505.965,74	6.686.827.571.185,56	2.713.206.511.905,22

Dalam rangka pencapaian tujuan sektor perindustrian yaitu meningkatnya kinerja sektor perindustrian dengan indikator tujuan tersebut adalah tercapainya Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, dengan sasaran Peningkatan Daya saing sektor perindustrian sehingga tercapai Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) atas dasar harga berlaku. Sedangkan tujuan sektor perdagangan adalah Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dengan indikator tercapainya Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan sehingga mencapai sasaran Peningkatan daya saing sektor perdagangan dan Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG sehingga meningkatnya Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB) dan Nilai SAKIP DINPERINDAG.

Untuk tercapainya meningkatkan kinerja sektor perindustrian dan sektor perdagangan maka diperlukanya peningkatan daya saing sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Daya saing merupakan suatu upaya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha/ekonomi agar tetap eksis dalam menjalankan kegiatannya. Istilah ini mudah diungkapkan dan menjadi program andalan dari pemerintah, akan tetapi istilah ini menjadi persoalan besar bagi pelaku ekonomi, khususnya para pelaku UMKM. Mereka menganggap bahwa daya saing memerlukan “perubahan mendasar dan strategi khusus”. Daya saing mensyaratkan level sumber daya manusia berkualitas, teknologi maju, modal yang cukup, serta lingkungan yang kondusif.

Dalam mencapai tujuan meningkatkan kinerja sektor perindustrian dan sektor perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai macam strategi dan cara dalam meningkatkan daya saing baik dalam urusan perindustrian maupun perdagangan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi



2. Urusan Perindustrian

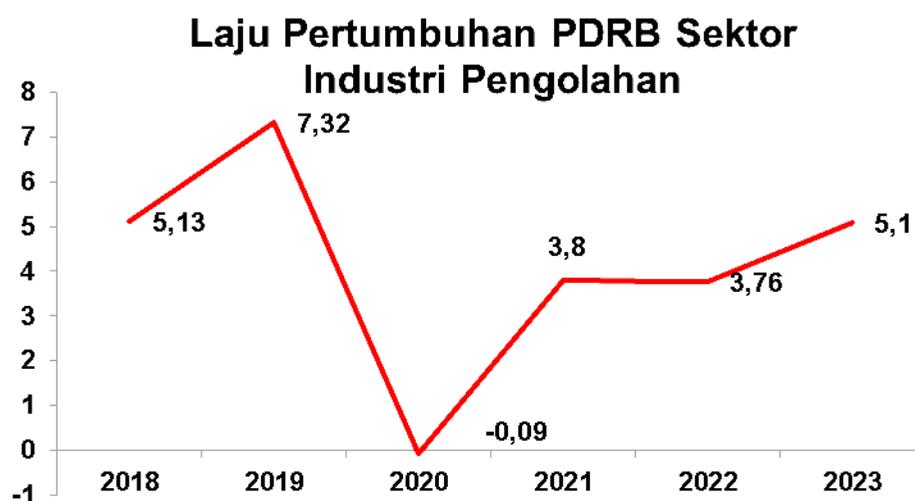
a. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di tahun 2023 mencapai 5,10%, dibandingkan dengan PDRB tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,34% dari 3,76%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah sudah stabil, dimana tiga tahun sebelumnya terdampak pandemi Virus Corona (Covid-19) yang memporak porandakan perekonomian walau sekarang dampaknya sudah hilang. Akan tetapi akibat efek pandemi Virus Corona (Covid-19) dimana pemasaran/promosi produk perdagangan yang semula dilakukan secara tradisional/canvas sekarang sudah beralih ke marketing online/digital, sehingga toko/swalayan/mall yang tidak dapat menyesuaikan perubahan mengalami gulung tikar, dan mulai menjamurnya toko toko online.

Tujuan

Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Sat	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	7,32	-0,09	3,80	3,76	3,76	5,10	135,64
Nilai Realisasi Kinerja									Tinggi



b. Sasaran : Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian guna mewujudkan tujuan strategis yaitu Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian maka salah satu indikatornya yaitu meningkatnya Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB).

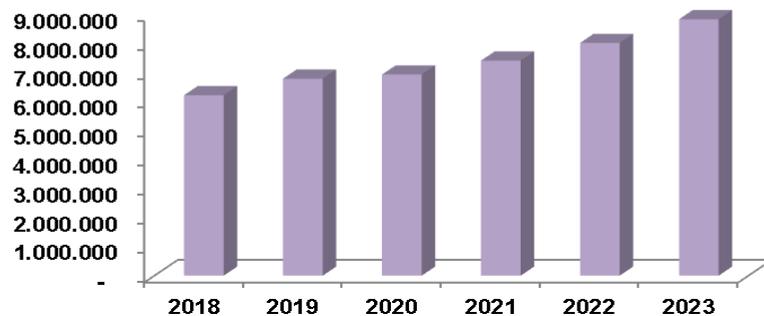
Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) tahun 2023 sebesar Rp. 8.832.360 juta rupiah, dibanding tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 814.180 juta rupiah dari Rp. 8.018.180 juta rupiah.

Sasaran

Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian

Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB)	Juta rupiah	6.786.620	6.928.780	7.408.950	8.018.180	8.018.180	8.832.360	110,15
Nilai Realisasi Kinerja								Sangat Tinggi

Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan/ADHB (juta rupiah)



Salah satu tolak ukur daya saing IKM adalah adanya jaminan kualitas produksi, legalitas usaha, serta kompetensi sumber daya manusia pelaku IKM. Meningkatkan jaminan kualitas produksi IKM dilakukan melalui cara pemberian bantuan peralatan produksi dan penerbitan sertifikasi IKM antara lain :

1. Sertifikat Jaminan Halal
2. Sertifikat Hak Merk
3. Sertifikat GMP
4. Sertifikat Profesi Keahlian Batik
5. Sertifikat Profesi Keahlian Las/SKKNi Welder
6. Sertifikasi HACCP
7. Sertifikasi ISO 22000

Untuk legalitas usaha yaitu kemudahan dalam perizinan sedangkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku

IKM dilakukan melalui pelatihan-pelatihan seperti pelatihan desain batik, makanan olahan, kerajinan dan sebagainya.

Secara umum pencapaian target indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 didukung oleh terealisasinya kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja di atas, antara lain :

- a. Pelatihan Kerajinan Anyaman Bambu Bagi IKM Anyaman Bambu
- b. Pelatihan Desain Fesyen dan Kerajinan Bagi IKM Fesyen dan Kerajinan Kab. Purbalingga
- c. Pelatihan Pembuatan Sapu Glagah Bagi IKM Sapu
- d. Pelatihan Pembuatan Alat Pengolahan Sampah
- e. Pelatihan Pewarnaan Batik dengan Pewarna Alami Bagi IKM Batik
- f. Pelatihan Perbengkelan Bagi IKM Perbengkelan
- g. Pelatihan Perakitan Kendaraan Listrik
- h. Bantuan Alat IKM Perbengkelan
- i. Bantuan Alat IKM Sapu
- j. Bantuan Alat IKM Kerajinan Bambu Klapasawit
- k. Bantuan Alat IKM Kendaraan Listrik
- l. Bantuan Alat IKM Konveksi
- m. Bantuan Alat IKM Batik
- n. Bantuan Alat IKM Sapu Azkarira
- o. Bantuan Alat IKM Bambu Karanggedang
- p. Bantuan Alat Stik Es Krim

Dalam upaya pencapaian target kinerja tujuan Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian dan sasaran Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pencapaian target kinerja tersebut, namun demikian dalam upaya tersebut terdapat hambatan dan tantangan yang harus dihadapi diantaranya :

1) Analisis Penyebab / Hambatan Pencapaian Kinerja

- Kurangnya ketersediaan pasokan barang untuk operasi industri pengolahan;
- Kurangnya akses permodalan bagi industri pengolahan;
- Penggunaan teknologi masih sederhana/kurang mengikuti jaman sehingga produksi masih rendah;
- Kekurangan tenaga kerja terampil sehingga menurunkan produktivitas;

2) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja

- Melaksanakan kemitraan Pemerintah dengan sektor swasta dalam penyediaan bahan baku;
- Memfasilitasi IKM dalam mengakses permodalan di perbankan;
- Bekerjasama dengan akademisi/universitas dalam pengembangan teknologi;
- Pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam meningkatkan SDM IKM pengolahan;

Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian pada urusan perindustrian, adalah sebesar Rp 1.030.766.110 atau 93,61% dari total pagu sebesar Rp. 1.101.139.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan keuangan sebesar 6,39% dari pagu yang ada.

Keberhasilan pencapaian ini sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu :

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

1.1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

- 1.2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- 1.3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat



Foto Kegiatan

Pelatihan Kerajinan Anyaman Bambu Bagi IKM Anyaman Bambu



Foto Kegiatan

Pelatihan Desain Fesyen dan Kerajinan Bagi IKM Fesyen dan Kerajinan Kab. Purbalingga



Foto Kegiatan
Pelatihan Pembuatan Sapu Glagah Bagi IKM Sapu



Foto Kegiatan
Pelatihan Pembuatan Alat Pengolahan Sampah



Foto Kegiatan
Pelatihan Pewarnaan Batik dengan Pewarna Alami



Foto Kegiatan
Pelatihan Perbengkelan Bagi IKM Perbengkelan



Foto Kegiatan
Pelatihan Perakitan Kendaraan Listrik



Foto Kegiatan
Bantuan Alat IKM Perbengkelan



Foto Kegiatan
Bantuan Alat IKM Sapu



Foto Kegiatan
Bantuan Alat IKM Kerajinan Bambu Klapasawit



Foto Kegiatan
Bantuan Alat IKM Kendaraan Listrik



Foto Kegiatan
Bantuan Alat IKM Konveksi



Foto Kegiatan
Bantuan Alat IKM Batik



Foto Kegiatan
Bantuan Alat IKM Sapu Azkarira



Foto Kegiatan
Bantuan Alat IKM Bambu Karanggedang



Foto Kegiatan
Bantuan Alat Stik Es Krim

3. Urusan Perdagangan

a. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Tujuan

Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Sat	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	6,50	-4,08	5,68	3,91	4,5	5,37	119,33
Nilai Realisasi Kinerja									Sangat Tinggi

Realisasi PDRB sektor perdagangan tahun 2023 sebesar 5,37% atau mencapai 119,33% dari target yang direncanakan 4,5%. Kalau dibandingkan dengan tahun 2022 nilai PDRB sektor perdagangan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,46% dari 3,91%. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian daerah di sektor perdagangan juga sudah stabil.



Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja PDRB sub sektor perdagangan selama tahun 2023 antara lain:

1. Pembinaan dan pengawasan pada distributor-distributor LPG, pupuk, SPBU, distributor KEPOKMAS dan barang penting/strategis lainnya;

2. Pembinaan dan pengawasan distribusi barang KEPOKMAS, barang penting dan strategis lainnya;
3. Pembinaan dan pengawasan toko swalayan;
4. Revitalisasi pasar rakyat.

b. Sasaran 1 : Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan

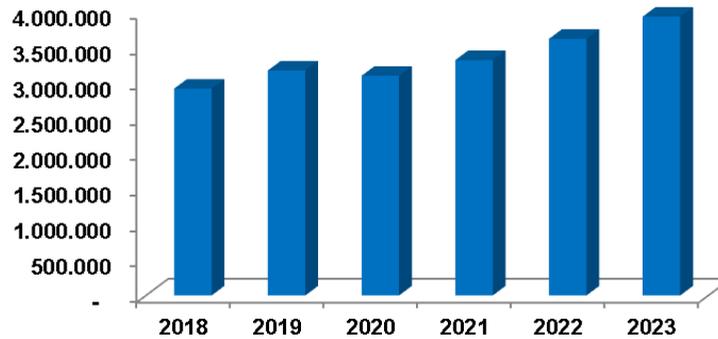
Dalam rangka pencapaian sasaran Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan guna mewujudkan tujuan strategis yaitu Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan tahun 2023 indikatornya yaitu meningkatnya Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB).

**Sasaran 1 Indikator 1
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Juta rupiah	3.174.300	3.099.090	3.320.850	3.620.500	3.620.500	3.934.080	108,66
Nilai Realisasi Kinerja									Sangat Tinggi

Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB) tahun 2023 sebesar Rp. 3.934.080 juta rupiah, dibanding tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 313.580 juta rupiah dari Rp. 3.620.500 juta rupiah.

Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB) (juta rupiah)



Dalam upaya meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan di tahun 2023 antara lain melalui :

1. Peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan yaitu melalui Rehabilitasi/Pembangunan Pasar Rakyat dan Program Dandan Warung;
2. Peningkatan nilai ekspor melalui pelatihan SDM di bidang ekspor impor;
3. Pengawasan Barang Kepokmas, Barang Penting dan Strategis seperti beras, minyak, kedelai dan lain-lain;
4. Pengawasan Barang Bersubsidi seperti elpiji dan pupuk;

Peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan salah satunya adalah pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional/rakyat. Jumlah pasar yang ada di Kabupaten Purbalingga ada 51 pasar, sebanyak 21 pasar adalah pasar milik pemerintah daerah dan 30 pasar milik desa. Dari total 51 pasar di Kabupaten Purbalingga banyak pasar yang sudah dapat dianggap tidak layak untuk transaksi perdagangan, dikarenakan kondisi sarana dan prasarannya sudah tidak baik.

Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 ada 16 kegiatan rehabilitasi guna mewujudkan pasar layak usaha adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Pasar Panican
2. Pembuatan Pintu Besi Pasar Rakyat Kertanegara
3. Perbaikan MCK Pasar Rakyat Karanganyar
4. Perbaikan Saluran Drainase Pasar Segamas
5. Pembangunan Kios Cabut Bulu Pasar Segamas
6. Penataan Lingkungan Pasar Rakyat Bobotsari
7. Penataan Lingkungan Pasar Rakyat Bukateja
8. Penataan Lingkungan Pasar Rakyat Kutawis
9. Pembangunan Pagar Keliling Pasar Rakyat Tobong
10. Penataan Halaman Pasar Rakyat Tobong
11. Pembangunan Kawasan PFC Tahap 3
12. Pembangunan Purbalingga Food Center (PFC) Tahap 4;
13. Pembangunan Lapak Kopi PFC Barat
14. Pematangan Lahan Revitalisasi Pasar Badog Bancar
15. Penataan Lingkungan Curgecang Kuliner Center (CKC)
16. Pembangunan Pasar Badog Bancar

Dalam rangka menjaga eksistensi pasar rakyat ditengah pertumbuhan toko swalayan maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai upaya peningkatan daya saing pasar rakyat salah satunya melalui kegiatan revitalisasi pasar rakyat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga berupaya meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pasar dan daya saing pengelola pasar melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan pasar dan study banding pengelolaan pasar.

Kedepan, disamping meningkatkan pengawasan dan pembinaan kebersihan pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga akan meningkatkan pengaplikasian program e-retribusi guna meningkatkan pelayanan retribusi serta meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah dari sektor layanan pasar, sedang Pasar yang sudah mengaplikasikan e-retribusi adalah Pasar bukateja

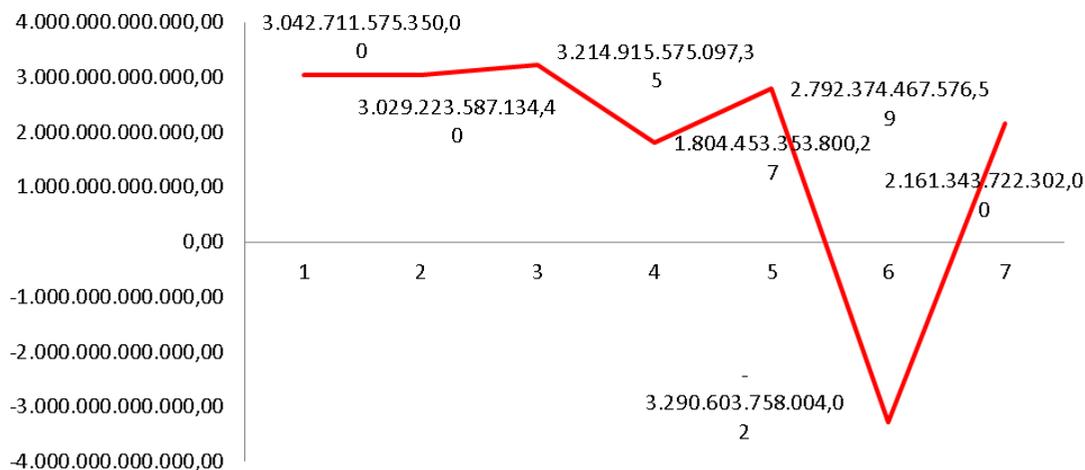
Selain melalui revitalisasi pasar, dalam rangka mewujudkan pasar sehat dan bersih dan pasar rakyat layak usaha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga telah meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan intensitas pengambilan sampah di TPS Pasar. Selain itu, juga menambah container sampah serta meningkatkan intensitas pembinaan terhadap para petugas kebersihan pasar agar lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Guna mewujudkan pasar sehat, bekerjasama dengan BPOM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, secara berkala juga melakukan pengawasan peredaran makanan/ minuman yang mengandung bahan berbahaya.

Pengawasan ekspor impor bagi perusahaan dan pelatihan ekspor bagi UKM potensi ekspor juga merupakan salah satu dalam rangka peningkatan daya saing sektor perdagangan. Untuk realisasi ekspor di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu turun sebesar Rp. -3.973.621.059.280,34 hal ini disebabkan karena menurunnya permintaan konsumen untuk ekspor, disamping itu juga stabilitas politik mendekati pemilihan presiden.



Untuk nilai ekspor Kabupaten Purbalingga tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp.(-3.290.603.758.004,02) menjadi Rp. 2.161.343.722.302,00 ditahun 2023. Nilai ekspor naik di tahun 2023 disebabkan karena permintaan untuk impor bahan baku di tahun 2023 sedikit.



Adapun perusahaan penyumbang nilai ekspor Kabupaten Purbalingga tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	EKSPOR	IMPOR	JUMLAH EKSPOR RIIIL
1	PT. ROYAL KORINDAH	0,00	0,00	0,00
2	PT. HYUP SUNG INDONESIA	58.556.268.101,59	1.825.189.156,80	56.731.078.944,79
3	PT. INDOKORES SAHABAT	515.064.855.247,06	267.033.050.022,93	248.031.805.224,13
4	PT. YURO MUSTIKA	88.728.380.793,82	13.757.152.679,00	74.971.228.114,82
5	PT. SUNG CHANG INDONESIA	508.075.202.260,44	65.857.371.926,06	442.217.830.334,38
6	PT. KESAN BARU SEJAHTERA	34.413.184.027,50	7.057.692.100,00	27.355.491.927,50
7	PT. HASTA PUSAKA SENTOSA (WIG)	13.289.398.880,28	470.526.378,44	12.818.872.501,84
8	PT. SUNG SHIM INTERNASIONAL	63.178.334.151,82	1.946.917.085,70	61.231.417.066,12
9	PT. HANMI HAIR INDONESIA	49.499.984.457,87	6.445.460.694,73	43.054.523.763,14
10	PT. BOYANG INDUSTRIAL	400.968.972.709,69	78.250.926.225,83	322.718.046.483,86
11	PT. INTERWORK INDONESIA	33.863.504.101,96	10.160.135.440,00	23.703.368.661,96
12	PT. MILAN INDONESIA	30.775.231.800,43	3.642.912.288,00	27.132.319.512,43
13	PT. WON JIN INDONESIA	10.534.304.016,00	1.620.796.935,00	8.913.507.081,00
14	PT. SOPHAN INDONESIA	13.059.114.877,95	1.449.709.317,15	11.609.405.560,80
15	PT. JHON TOYS INDONESIA (BONEKA)	0,00	0,00	0,00
16	PT. MAHKOTA ESTETIKA ABADI	1.358.265.016,00	0,00	1.358.265.016,00
17	PT VICTORIA BEAUTY INDUSTRIAL	206.453.054.449,93	80.131.617.272,03	126.321.437.177,90
18	PT. TIGA PUTRA ABADI PERKASA	21.407.674.305,00	0,00	21.407.674.305,00
19	PT. SUNSTARINDO WIRAHUSADA	11.475.265.971,78	55.094.400,00	11.420.171.571,78
20	PT. SHINHAN CREATINDO	5.576.937.149,65	0,00	5.576.937.149,65
21	PT. BINTANG MAS TRIYASA	78.009.324.051,40	2.162.115.811,00	75.847.208.240,40
22	PT. SINAR CENDANA ABADI	27.274.561.444,88	1.745.687.641,45	25.528.873.803,43
23	PT. MAHTOKA TRI ANGJAYA (BULU MATA)	59.350.950.522,00	6.396.879.231,00	52.954.071.291,00
24	PT. ROSA SEJAHTERA EYELASHES	19.009.943.299,20	317.224.755,00	18.692.718.544,20
25	PT. BIMA NUGRAHA	26.196.947.590,94	97.500.000,00	26.099.447.590,94
26	PT. KARYA BHAKTI MANUNGGAL	19.419.716.106,00	0,00	19.419.716.106,00
27	PT. MAJAPURA	63.274.150.205,01	0,00	63.274.150.205,01
28	CV. PURBAYASA	207.326.648.685,01	26.367.840,00	207.300.280.845,01
29	CV. SN JAYA PRIMA	30.191.309.313,00	0,00	30.191.309.313,00
30	CV. PHOENIX AGUNG PRIMA (KAYU LAPIS)	77.340.767.750,00	0,00	77.340.767.750,00
31	CV. RAYUNG PELANGI	1.024.890.000,00	0,00	1.024.890.000,00
32	PT. RAYUNG PELANGI NUSANTARA	1.313.079.000,00	0,00	1.313.079.000,00
33	PT. CAYA AKUSARA INDONESIA	230.068.978,00	0,00	230.068.978,00
34	PT. BINTANG SEMESTA ADIGUNA	0,00	0,00	0,00
35	PT. STELLARIS INTERNATIONAL	0,00	0,00	0,00
36	PT SERASI GAYA BUSANA	0,00	0,00	0,00
37	PT TRESSINDO ABADI CEMERLANG	28.164.315.261,01	1.412.462.403,10	26.751.852.857,91
38	CV BUNGA PALM	8.801.907.380,00	0,00	8.801.907.380,00
JUMLAH		2.713.206.511.905,22	551.862.789.603,22	2.161.343.722.302,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa sebagian besar nilai ekspor Kabupaten Purbalingga masih sangat mengandalkan perusahaan-perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan produk unggulan rambut palsu dan bulu mata palsu. Hanya sebagian kecil perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang sudah eksis menyumbang nilai ekspor.

Oleh karena itu kedepan perlu diupayakan agar perusahaan dan industri kecil menengah Kabupaten Purbalingga yang memiliki potensial ekspor untuk terus dapat dilakukan pembinaan serta fasilitasi sehingga mereka mampu ekspor sekaligus sebagai upaya diversifikasi produk ekspor Kabupaten.

Dalam upaya pencapaian target ekspor di Kabupaten Purbalingga setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan nilai ekspor yaitu berupa pelatihan manajemen dan prosedur ekspor yang secara rutin diselenggarakan melalui kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Balai Pengembangan Pelatihan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan RI. Kegiatan tersebut melibatkan peserta sebanyak 40 orang perwakilan perusahaan potensial ekspor

Kegiatan monitoring perkembangan ekspor di setiap perusahaan eksportir secara berkala juga terus dilakukan untuk memantau perkembangan nilai ekspor serta mengetahui secara dini kemungkinan adanya kendala/ hambatan yang ditemui eksportir.

Upaya lain untuk meningkatkan nilai eksport di Kabupaten Purbalingga juga dilakukan melalui fasilitasi perijinan eksport sesuai ketentuan berlaku, aktif mengikuti kegiatan promosi/pameran/misi dagang baik dalam skala regional, nasional maupun internasional serta turut mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif di Kabupaten Purbalingga.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai program kegiatan dalam pencapaian target kinerja tujuan Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan dan target sasaran Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan, namun demikian dalam pencapaian target tersebut banyak sekali hambatan yang dihadapi.

1) Hambatan/Kendala yang Dihadapi

- Produk lokal sering kali menghadapi masalah kualitas yang tidak konsisten, yang disebabkan oleh kurangnya standar mutu dan teknologi produksi yang masih tertinggal, sehingga berdampak mengurangi kepercayaan konsumen;
- Rendahnya tingkat adopsi teknologi dan inovasi di kalangan pelaku UKM;
- Produk impor yang murah dan berkualitas tinggi dari negara lain menciptakan persaingan yang ketat bagi produk lokal, sehingga memaksa produsen lokal untuk menurunkan harga dan margin keuntungan, yang dapat berdampak negatif pada keberlanjutan usaha;

2) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja

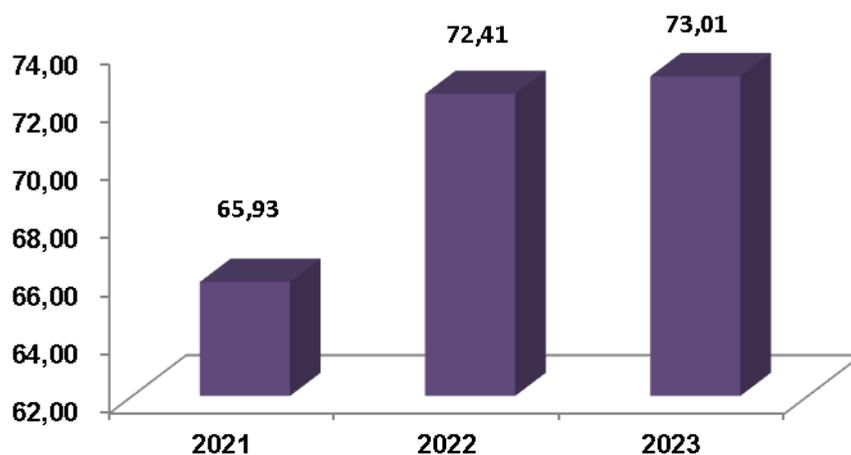
- Peningkatan standar mutu melalui pelatihan dan fasilitasi sertifikasi produk bekerjasama dengan Dinkes dalam menerbitkan PIRT dan BPOM dalam standar mutu produk;
- Mendorong adopsi teknologi modern dalam proses produksi bekerja dengan akademisi/universitan dalam penggunaan teknologi tepat guna;
- Membuat regulasi yang melindungi produk-produk lokal;

c. Sasaran 2 : Meningkatkan implementasi SAKIP DINPERINDAG

Dalam rangka pencapaian sasaran kedua Meningkatkan implementasi SAKIP DINPERINDAG, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga melakukan berbagai hal yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM Dinperindag melalui diklat dan pelatihan;
2. Peningkatan tertib administrasi kegiatan melalui pengawasan/monitoring dan evaluasi kegiatan;

Nilai SAKIP DINPERINDAG



Sasaran 2 Indikator 1 Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG	Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	NA	NA	65,93	72,41	72,41	73,01	100,83
Nilai Realisasi Kinerja									Sangat Tinggi

1) Hambatan/Kendala yang Dihadapi

Hambatan dalam pencapaian target kinerja Meningkatkan implementasi SAKIP DINPERINDAG diantaranya adalah :

- Masih banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami konsep dan pentingnya SAKIP;

- Budaya birokrasi yang masih konvensional dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan besar. Banyak pegawai yang merasa nyaman dengan sistem lama dan enggan beradaptasi dengan sistem baru;

2) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja

- Meningkatkan kapasitas dan pemahaman pegawai melalui nonton bareng di youtube tentang SAKIP
- Mendorong perubahan budaya kerja dan meningkatkan komitmen pimpinan instansi terhadap implementasi SAKIP

d. Sasaran 3 : Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sasaran ke tiga yaitu meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, merupakan sasaran tambahan di tahun 2023 dimana adanya kebijakan pemerintah tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri di lingkungan pemerintah daerah dimana Dinperindag sebagai koordinatonya.

Kebijakan penggunaan produk dalam negeri adalah strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong konsumsi produk-produk yang diproduksi di dalam negeri dari pada produk impor. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat sektor-sektor industri dalam negeri. Prosentase penggunaan produk dalam negeri ditahun 2023 ditarget sebesar 40% dari batas minimal penggunaan produk dalam negeri yang diwajibkan, dan terealisasi sebesar 72,12%.

Sasaran 3 Indikator 1
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Prosentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	NA	NA	NA	NA	40	72,12	180,30
Nilai Realisasi Kinerja									Sangat Tinggi

Dalam menerapkan penggunaan produk dalam negeri di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, banyak sekali hambatan yang dihadapi.

1) Hambatan/Kendala yang Dihadapi

- Banyak produk dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produk impor dalam hal kualitas;
- Masih banyak UKM yang belum masuk E-Katalog Lokal;

2) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja

- Mendorong inovasi produk dengan memberikan dukungan penelitian dan pengembangan (R&D) kepada industri lokal bekerjasama dengan akademisi/universitas;
- Sosialisasi kepada UKM tentang E-Katalog lokal;

Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, 2 dan 3 adalah sebesar Rp. 11.350.513.779,00 atau 96,18% dari total pagu sebesar Rp. 11.801.627.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan keuangan sebesar 3,82% dari pagu yang ada.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 dan 2 tidak terlepas dari pelaksanaan 5 program, 15 kegiatan dan 27 sub kegiatan, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - 4.1) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5.4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 5.5) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
 - 1) Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - 1.1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - 2.1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 1) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 1.1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

- 1.2) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2) Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - 2.1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - 1) Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1.1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - 1.2) Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - 2) Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - 2.1) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1) Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
- e. Program Pengembangan Ekspor
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
- f. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - 1.1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang



Foto Kegiatan
Pembangunan Pasar Rakyat Badog Bancar Tahap 2



Foto Kegiatan
Pelatihan Ekspor – Impor



Foto Kegiatan
Kegiatan Pasar Murah



Foto Kegiatan
UTTP Metrologi Legal



Foto Kegiatan
Pengawasan BDKT

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah sebesar Rp 12.381.279.889 atau sebesar 95,96% dari total anggaran sebesar Rp 12.902.766.000 dari realisasi anggaran tersebut, sebesar Rp. 6.427.713.675 merupakan pengeluaran atas belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 yang dapat dicapai Tahun 2023 untuk setiap program dan kegiatan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Total (Rp.)	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.715.061.000	7.434.146.885	96,36
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.124.000	4.123.500	99,99
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.250.000	2.250.000	100,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.874.000	1.873.500	99,97
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.819.250.000	6.568.140.663	96,32
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.678.707.000	6.427.713.675	96,24
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	78.693.000	78.576.988	99,85
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	61.850.000	61.850.000	100,00
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.913.000	1.500.000	51,49
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.913.000	1.500.000	51,49
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.502.000	49.602.050	98,22

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Total (Rp.)	%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.665.000	1.663.900	99,93
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.814.000	30.335.650	98,45
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	999.000	915.000	91,59
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.295.000	13.087.500	98,44
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.729.000	3.600.000	96,54
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	684.488.000	668.156.872	97,61
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.456.000	0	0,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224.800.000	210.103.502	93,46
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	458.232.000	458.053.370	99,96
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.784.000	142.623.800	92,74
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.459.000	127.363.800	91,99
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.325.000	11.260.000	99,43
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000	4.000.000	100,00
B	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	12.488.000	12.134.900	97,17
VII	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	6.244.000	5.892.300	94,37
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.244.000	5.892.300	94,37

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Total (Rp.)	%
VIII	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	6.244.000	6.242.600	99,98
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	6.244.000	6.242.600	99,98
C	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.564.729.000	3.395.691.371	95,26
IX	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.480.560.000	3.311.533.315	95,14
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	208.124.000	205.827.797	98,90
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.272.436.000	3.105.705.518	94,91
X	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	84.169.000	84.158.056	99,99
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	84.169.000	84.158.056	99,99
D	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	174.988.000	174.790.467	99,89
XI	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	149.390.000	149.243.338	99,90
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	14.110.000	14.016.038	99,33
2	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	135.280.000	135.227.300	99,96
XII	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	18.106.000	18.096.329	99,95

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Total (Rp.)	%
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	18.106.000	18.096.329	99,95
XIII	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.492.000	7.450.800	
1	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	7.492.000	7.450.800	99,45
E	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	49.949.000	49.577.555	99,26
XIV	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.949.000	49.577.555	99,26
1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	49.949.000	49.577.555	99,26
F	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	284.412.000	284.172.601	99,92
XV	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	284.412.000	284.172.601	99,92
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	284.412.000	284.172.601	99,92
G	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.101.139.000	1.030.766.110	93,61
XVI	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.101.139.000	1.030.766.110	93,61
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	347.647.000	299.193.188	86,06

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Total (Rp.)	%
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	372.762.000	352.099.384	94,46
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	380.730.000	379.473.538	99,67
Jumlah Total		12.902.766.000	12.381.279.889	95,96

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp 12.902.766.000
 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp 12.381.279.889
 Sisa Anggaran Tahun 2023 : Rp. 381.178.049,00
 Nilai capaian Realisasi Keuangan Tahun 2023 : 95,96%

3.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian kinerja sasaran urusan Perindustrian didukung dengan Program sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung
Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB) (Juta rupiah)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHB) (Juta rupiah)	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		Program Pengembangan Ekspor
Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG	Nilai SAKIP Dinperindag	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Sasaran dan Indikator Kinerja	Sat	Target	Real	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian									
1	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB)	Rupiah (Juta)	8.018.180	8.832.360	110,15	1.101.139.000	1.030.766.110	93,61	16,54
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan									
1	Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Rupiah (Juta)	3.620.500	3.934.080	108,66	4.086.566.000	3.916.366.894	95,84	12,82
Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG									
1	Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	72,41	73,01	100,83	7.715.061.000	7.434.146.885	96,36	4,47
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri									
1	Prosentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	40%	72,12	180,30	7.715.061.000	7.434.146.885	96,36	83,94

Adapun analisis atas efektifitas penggunaan anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	Sat	Capaian (%)	Realisasi	Capaian Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	135,64	1.101.139.000	1.030.766.110	Efisien
Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian					
1 Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB)	Rupiah (Juta)	110,15	1.030.766.110	93,61	Efisien
Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	119,33	11.801.627.000	11.350.513.779	Efisien
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan					
1 Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Rupiah (Juta)	108,66	3.916.366.894	95,84	Efisien
Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG					
1 Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	100,83	7.434.146.885	96,36	Efisien
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri					
1 Prosentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	180,30	7.434.146.885	96,36	Efisien

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian

Tujuan Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian dengan indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dikatakan efisien dalam sumber daya, hal ini dapat dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu sebesar Rp. 1.101.139.000 terealisasi sebesar Rp. 1.030.766.110 atau sebesar 93,61% dibandingkan capaian kinerja tujuan sebesar 135,64%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor perindustrian;
- b. Monitoring laporan terhadap perusahaan yang terdata dalam SIINas;

2) Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian

Sasaran Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian dengan indikator kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) dikatakan efisien dalam sumber daya, hal ini dapat dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 1.101.139.000 terealisasi sebesar Rp. 1.030.766.110 atau sebesar 93,61% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 110,15%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Kegiatan peningkatan sumber daya industri melalui peningkatan kualitas SDM;
- b. Peningkatan kualitas produksi melalui peningkatan sarana prasarana industri;

3) Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan

Tujuan Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan dengan indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dikatakan efisien dalam sumber daya, hal ini dapat dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu sebesar Rp. 11.801.627.000 dengan realisasi Rp. 11.350.513.779 atau sebesar 119,33% dibandingkan dengan

capaian kinerja tujuan sebesar 119,33%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang baik;
- b. Pembinaan dan Pengendalian terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;

4) Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan

Sasaran Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator kinerja Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB) dikatakan efisien dalam sumber daya, hal ini dapat dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.4.086.566.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.916.366.894 atau sebesar 95,84% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 108,66%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan bagi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan;
- b. Monitoring stabilitasi harga kebutuhan pokok dan barang penting;
- c. Peningkatan Citra Produk Ekspor melalui pelatihan ekspor ;
- d. Standarisasi dan perlindungan konsumen melalui Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

5) Meningkatkan implementasi SAKIP DINPERINDAG

Untuk Sasaran Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG dengan indikator kinerja Nilai SAKIP DINPERINDAG dikatakan efisien dalam sumber daya, hal ini dapat dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.7.715.061.000, dengan capaian realisasi sebesar Rp. 7.434.146.885 atau sebesar 96,36% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,83%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Pelaksanaan pemahaman pegawai melalui nonton bareng tentang SAKIP di Youtube;
- b. Melakukan perbaikan target Indikator Kinerja Utama;

- c. Berusaha melaksanakan hasil rekomendasi tim Evaluator SAKIP Inspektorat.
- 6) Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri
- Sasaran Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dengan indikator Prosentase penggunaan produk dalam negeri dikatakan efisien dalam sumber daya, hal ini dapat dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.7.715.061.000, dengan capaian realisasi sebesar Rp. 7.434.146.885 atau sebesar 96,36% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 180,30%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :
- a. Pembentukan TIM P3DN (Produk Dalam Negeri) melalui SK Bupati;
 - b. Rakor PDN dengan berkoordinasi dengan OPD tiap tiga bulan sekali;
 - c. Surat Edaran Bupati tentang kewajiban menggunakan E Katalog Lokal;

BAB IV P E N U T U P

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga merupakan dinas yang memegang tugas dan fungsi dua urusan pemerintah yaitu urusan di bidang perindustrian dan urusan di bidang perdagangan, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah yaitu Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah dengan mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya yaitu sektor industri pengolahan dan manufaktur, serta sektor perdagangan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor industri dan perdagangan di wilayah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang positif, hal ini dapat dilihat dengan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dicapai dengan baik, program-program yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan daya saing industri lokal dan memperluas jaringan perdagangan.

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	135,64

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Capaian Kinerja (%)
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB)	Rupiah (Juta)	110,15
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	119,33
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Rupiah (Juta)	108,66
		Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG	Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	100,83
		Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Prosentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	180,30

4.2 Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya kenaikan harga kepokmas terutama minyak goreng dan beras terutama pada saat hari-hari besar keagamaan;
2. Pembangunan Pasar Rakyat / Tradisional Badog Bancar Tahap II
Kegiatan ini merupakan pekerjaan fisik untuk penyelesaian Pembangunan Pasar Rakyat Badog Bancar yang anggarannya dibiayai dengan dana Tugas Pembantuan APBN Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, hanya saja anggaran yang ada tidak dapat untuk membangun fasilitas pendukung pasar seperti jalan lingkungan dan pagar keliling pasar,

4.3 Strategi Pemecahan Masalah/Tindak Lanjut

1. Dengan adanya kenaikan harga minyak goreng dan beras Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga melakukan berbagai strategi :
 - Melakukan kegiatan pasar murah di delapan lokasi, dengan sasaran masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat yang kurang mampu/miskin;
 - Melakukan kegiatan operasi pasar di pasar tradisional bekerjasama dengan BULOG sampai dengan pendistribusian barang dengan harga yang sudah ditentukan batas harga tertinggi sampai kekonsumen;
2. Dengan belum terselesaikannya fasilitas pendukung Pasar Rakyat/Tradisional Badog Bancar secara keseluruhan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga melakukan koordinasi dengan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dan di tahun 2024 telah disediakan dana untuk pembuatan jalan lingkungan pasar/pavingisasi yang rencana akan dilaksanakan di triwulan I mulai perencanaan dan triwulan II mulai pelaksanaan.

4.4 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain :

1. Terkait Pencapaian Sasaran 1 Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian
 - a. Peningkatan kualitas produk IKM melalui peningkatan teknologi dalam hal peralatan produksi sehingga kualitas produk menjadi lebih baik;
 - b. Peningkatan kualitas SDM IKM, sehingga mampu menciptakan Entrepreneur yang handal dan inovatif;
 - c. Memfasilitasi IKM dalam mempromosikan produknya melalui pameran lokal, regional, nasional maupun internasional;

- d. Peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi produk seperti sertifikasi PIRT, halal, paten, dan BPOM;
2. Terkait Pencapaian Sasaran 2 Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan
- a. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan;
 - b. Meningkatkan pengetahuan ekspor bagi UKM yang prosepektif ekspor;
 - c. Meningkatkan SDM pengelola pasar melalui pelatihan manajemen pengelolaan pasar;
 - d. Pelaksanaan pembinaan para pedagang pasar secara berkala;
 - e. Melaksanakan revitalisasi pasar melalui dana APBD, provinsi maupun pusat (TP);
3. Terkait Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG
- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya SAKIP di antara staf dan pimpinan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga. Pemimpin organisasi perlu memberikan dukungan penuh dan menunjukkan komitmen dalam menerapkan SAKIP;
 - b. Meningkatkan pemahaman pegawai tentang SAKIP melalui pelatihan-pelatihan/ in house training terutama terhadap Tim Penerapan SAKIP Internal;
 - c. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi SAKIP untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan
4. Terkait Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri
- a. Penguatan kegiatan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. Peningkatan intensitas pengawasan penggunaan produk dalam negeri oleh tim P3DN;

- c. Implementasi kebijakan preferensi produk dalam negeri dalam proses pengadaan pemerintah daerah;
- d. Pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap implementasi kebijakan preferensi produk dalam negeri di pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan dan efektivitasnya

Purbalingga, 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Purbalingga

